

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang menganalisis hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan ketepatan waktu sudah banyak ditemukan. Penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diharapkan mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan sistem bisnis yang berbasis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Beberapa perbedaan penelitian tentang *corporate governance* disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Savitri (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit.	Penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.	Siregar dan Darsono (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kinerja Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Bagi Perusahaan yang Mempublik.	<p>Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas Rasio, <i>Leverage Ratio</i>, Likuiditas Rasio, dan Aktivitas Rasio.</p> <p>Sampel dan Populasi: Perusahaan Manufaktur 2007-2008.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas Rasio, <i>Leverage Ratio</i>, dan Aktivitas Rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, likuiditas rasio memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p>
3.	Yusrianti, dkk., (2012)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Keuangan, dan Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.	<p>Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> Keuangan, dan Likuiditas.</p> <p>Populasi dan Sampel: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam <i>Indonesian Capital Market Directory</i> (ICMD) tahun 2008.</p>	<p>Hasil peneitian membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan pada variabel <i>leverage</i> keuangan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p>

4.	Rianti (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.	Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Sampel dan Populasi: Perusahaan Manufaktur 2009-2011	Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
----	------------------	---	---	---

Sumber: Berbagai Jurnal yang Dipublikasikan

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Manurung (2006:41) hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*.

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) mamiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi-asumsi sifat

manusia dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Manajer berkewajiban memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*prinsipal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurangan dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Corporate governance diharapkan berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham.

2.2.2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua BAPEPAM atau sekarang dilebur menjadi OJK. OJK semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal *annual report* yang telah diaudit.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seperti halnya konsep tadi, kepatuhan akan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK lebih disebabkan karena adanya otoritas penyusun hukum yaitu UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang secara tidak tertulis menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada OJK selaku badan yang dipercaya pemerintah untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI, maka kepatuhan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan kewajiban mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

2.2.3. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.3.1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Fujinuma (2001) dalam Effendi (2009:1) adalah sebagai berikut.

“Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the

company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment".

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sulistiyanto (2008:134) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Untuk itu ada dua hal perlu ditekankan dalam hal ini, yaitu (1) hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan, dan (2) kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.

2.2.3.2. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Jemsly dan Martani (2006:48) menyatakan manfaat melaksanakan GCG, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan operasional perusahaan, dan lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.

2.2.3.3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Jemsly dan Martani (2006:48) menyatakan bahwa pelaksanaan praktik *good corporate governance* di Indonesia menganut lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam proses dan pengungkapan informasi kinerja perusahaan secara akurat.
2. Independensi (*independency*), yaitu kebebasan melakukan tugas dan kewenangan tanpa pengaruh/tekanan pihak manapun.
3. Keadilan (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap para *stakeholders*.
4. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu pengelolaan perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikad baik.
5. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu pertanggung jawaban kepada *stakeholders* sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku.

2.2.4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan. Ketepatan waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan keuangan perusahaan publik diatur dalam Peraturan OJK Nomor VIII.G.2, lampiran laporan tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukan peraturan OJK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua OJK Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan OJK Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

2.2.5. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh komisaris independen merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, komisaris independen mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Komisaris independen menjembatani kepentingan prinsipal dan manajer di dalam perusahaan.

Bukhori (2012) mendefinisikan komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan *controlling shareholders*, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-339/BEI/07-2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki:

- a. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris.
 - b. Komite audit
 - c. Sekretaris perusahaan
2. Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perseroan terbatas yang bersangkutan
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
 - d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen, diharapkan dapat mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Karena dengan ketepatan waktu investor dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi.

2.2.6. Kepemilikan Manajerial

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Manajer diperlakukan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Menurut Arief dan Bambang (2007) kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Salah satu mekanisme pengawasan internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer merupakan bagian dari kontrak insentif jangka panjang. Kontrak jangka panjang yang dilakukan dengan memberikan insentif kepada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat adalah salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer. Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Savitri (2010) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk meningkatkan kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada ditangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur pilihan-pilihan metode akuntansi, serta memutuskan kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang besar cenderung tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya.

Dalam kepemilikan saham perusahaan yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Menurut

Arief dan Bambang (2007), kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

2.2.7. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ektern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor, mengawasi audit laporan keuangan, memastikan agar standar dan kebijakan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh auditor eksternal (Savitri, 2010).

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN) bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi komite audit beranggotakan terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman

anggota. Sedapat mungkin anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Dengan dibentuknya komite audit merupakan salah satu upaya auditor dalam mempertahankan independensinya. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan menjadi lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir (Rachmawati, 2013) dan mempengaruhi perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu kepada stakeholder.

2.2.8. Profitabilitas

Penilaian profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Menurut James (2005:222) rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Menurut Yusrianti, dkk. (2012) rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya.

Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Santoso, 1998:96). Terdapat beberapa cara untuk menilai kinerja suatu perusahaan, salah satunya dengan mengamati

tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik.

Ketepatan waktu dan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan. Jika laba berisi berita baik (*good news*), maka pihak manajemen cenderung melaporkan tepat waktu dan sebaliknya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka diduga perusahaan akan semakin cepat menyampaikan laporan keuangannya.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan rumus ROA (*Return on Assets*) untuk melihat pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. ROA yang digunakan diukur dengan membagi laba bersih dengan jumlah aktiva.

2.2.9. Leverage

Menurut James (2005:209) rasio *leverage* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* keuangan dapat diartikan sebagai penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dalam sebuah perusahaan.

Tingginya *leverage* keuangan mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata publik.

Dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan. perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktiva. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri.

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*) untuk melihat pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. DER yang diukur dengan membagi total utang dengan total modal sendiri.

2.3. Pengaruh Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Jama'an (2008) meneliti tentang hubungan antara proporsi dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris independen yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Komisaris independen diukur dengan persentase jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan. Hasil penelitian dari Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa komisaris

independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Peran aktif komisaris independen diharapkan mampu menjadi monitoring kinerja manajemen dan menjamin transparansi dan akuntabilitas suatu laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan demi kepentingan stakeholder, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Meningkatnya proporsi saham yang dinilai oleh manajer akan mengurangi resiko tindakan manipulasi.

Savitri (2010) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Sedangkan, hasil penelitian Respati (2004) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak terbukti secara statistik mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan. Volume kepemilikan

manajerial secara empiris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan.

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi antara jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dengan seluruh total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar akan mengikutsertakan manajer secara langsung untuk merasakan manfaat dari keputusan yang telah diambil dan menanggung konsekuensi pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan oleh manajer dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas dan menyampaikan laporan keuangan ke publik tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Komite audit yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atau proses laporan keuangan dan audit ekstern (Jama'an, 2008). Dengan menjalankan tugas ini, maka diharapkan komite audit dapat meningkatkan kecukupan pengendalian internal perusahaan, kesesuaian kebijakan akuntansi dengan standar yang berlaku dan pengawasan terhadap auditor eksternal sehingga dapat mencegah kecurangan dan meningkatkan kualitas serta ketepatan waktu penyampaian (*timeliness*) laporan keuangan.

Andri dan Hanung (2007), komite audit mempunyai peranan penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*.

Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada publik secara tepat waktu. Sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA biasanya disebut sebagai hasil pengembalian atas total aktiva. Penelitian Petronila dan Mukhlisin (2003) menyimpulkan bahwa profitabilitas dapat menjelaskan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Semakin besar rasio profitabilitas, semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Menurut Gede (2004), mengungkapkan bahwa perusahaan dengan hasil gemilang cenderung berusaha untuk menyajikan laporan keuangannya lebih tepat waktu. Hal ini berarti profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.5. Pengaruh *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ratio *Debt to Equity* (DER) juga dikenal sebagai rasio finansial *leverage*, Respati (2004) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur tingkat aktivitas perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang.

Tingginya rasio *debt to equity* mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya, baik berupa pokok maupun bunganya. Rasio *leverage* mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh pengguna hutang. Tingginya resiko keuangan dapat mengidentifikasi perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang merupakan berita buruk, maka pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangannya. Hasil penelitian Gede (2004) menunjukkan bahwa solvabilitas atau *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan. Dan *leverage* memiliki hubungan positif terhadap rentang waktu penyajian laporan keuangan, dengan kata lain *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

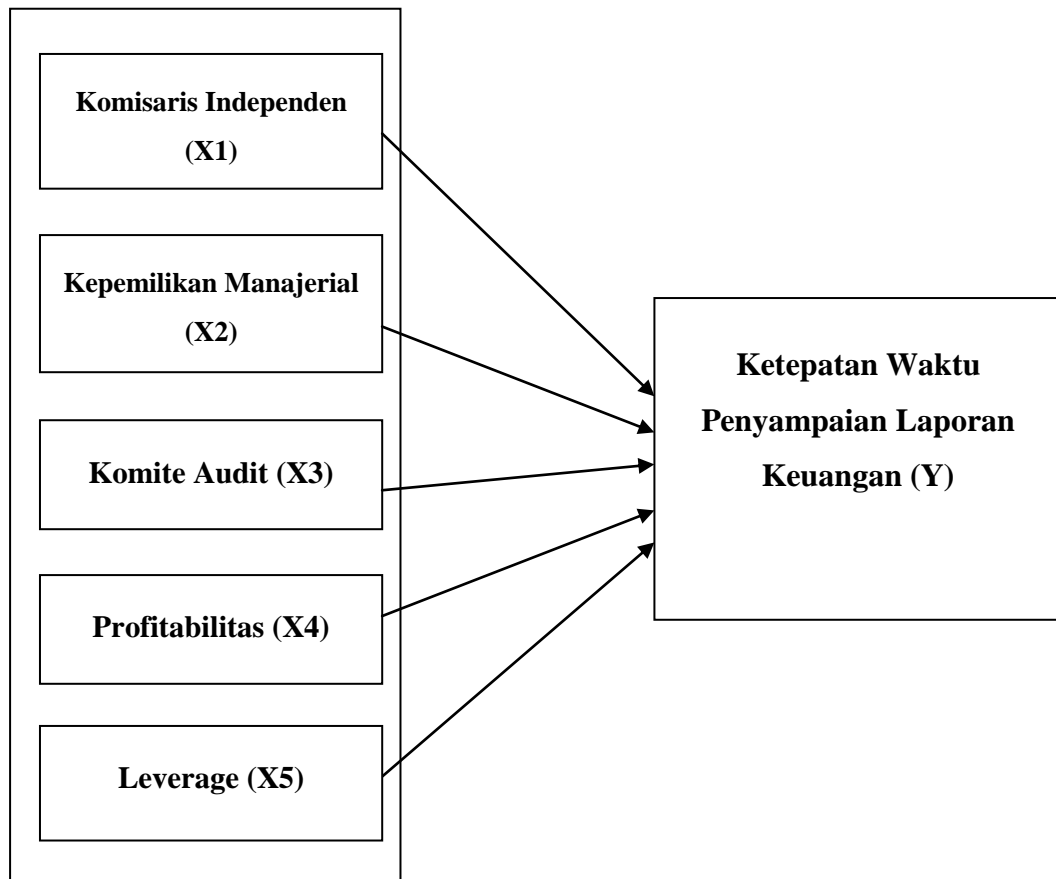
2.4. Rerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan, variabel dependen adalah *timeliness* penyampaian laporan keuangan.

Adanya komisaris independen, sebagai salah satu pengukuran mekanisme *corporate governance*, memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan. Perusahaan yang memiliki komisaris independen cenderung akan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai penyeimbang dalam kepemilikan saham. Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat tercapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan meningkatkan integritas laporan keuangan, serta dapat menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh adanya komite audit, profitabilitas, dan *leverage*. Komite audit bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jujur sehingga laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu kepada *stakeholder's*. Profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Setiap perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang perusahaan. Perusahaan yang dapat membayar hutangnya, maka perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu.

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Kerangka Konseptual
Gambar 2.1**